

**HARMONISASI REGULASI BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

KRISTIANA

C 100 120 235

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
HARMONISASI REGULASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

KRISTIANA

C100120235

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 23 Januari 2020

Dewan Penguji

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Nuria Siswi, SH., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Muchamad Iksan, S.H, M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyanti, S.H., M.Hum)

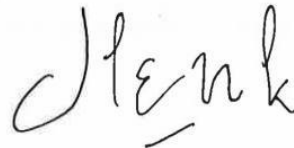
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah ditunjukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila nanti terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 20 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Kristiana

NIM: C.100.120.235

HARMONISASI REGULASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN

Abstrak

Pendidikan penyandang disabilitas merupakan hak yang telah mendapatkan pengakuan baik dalam aturan internasional maupun nasional. Pengakuan hak pendidikan terdapat pada artikel 26 The Universal Declaration of Human Rights, pada article 13 mengakui pendidikan dasar harus diberikan kepada setiap orang dengan Cuma-cuma. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Hal ini terdapat pada pasal Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik dalam aturan internasional tentang penyandang disabilitas adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities dengan Resolusi 61/106 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dan hak pendidikan diatur dalam article 24. Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 12. Secara spesifik perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya jaminan pendidikan ini, penyandang disabilitas memiliki jalan yang luas dalam meningkatkan kemampuan diri untuk beradaptasi terhadap teknologi dan untuk mendapatkan standart kehidupan yang lebih baik. Implementasi undang-undang pada dasarnya pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Pendidikan, Upaya Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

Abstract

Education of persons with disabilities is a right that has gained recognition both in international and national regulations. Recognition of the right to education is contained in article 26 of the Universal Declaration of Human Rights, in article 13 recognizing basic education must be provided to everyone for free. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) which has been ratified by Law No. 11 of 2005 which recognizes education as a human right. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which determines that education is a basic right of citizens. This is contained in Article 28 C paragraph (1) and Article 28 E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Specifically in the international regulation on persons with disabilities is the Convention on the Rights of People with Disabilities with Resolution 61/106 which was later ratified with Law Number 19 of 2011. And the right to education is regulated in article 24. The right to education has also been regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights especially Article 12. Specifically the protection of the rights of persons with disabilities including the right to education is contained in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. With this education guarantee, people with disabilities have broad avenues in increasing their ability to adapt to technology and to get a better standard of life. The implementation of the law is basically the local government through the Social Service and Extraordinary Schools trying to fulfill the rights of persons with disabilities especially in education.

Keywords: *Persons with Disabilities, Educational Rights, Government Efforts Against Persons with Disabilities*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepada manusia baik harkat dan martabatnya yang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia secara universal, kekal, langgeng yang dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik maupun mental, akan tetapi juga diberikan perlindungan kepada kelompok yang memiliki rentan seperti penyandang disabilitas.¹

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang memiliki makna manusia dengan kemampuan berbeda. Istilah ini digunakan untuk mengganti penyandang cacat yang dinilai negatif dan cenderung diskriminatif. Disabilitas merupakan manusia yang diciptakan berbeda bukan didasarkan cacat atau abnormal.² Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, disabilitas diantaranya terdiri dari fisik, mental

¹ Eta Yuni Lestari *et.all*, 2017, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan*, No.1/Th. XXVII/2017, Januari-Juni, hal. 2.

² Sugi Rahayu, Utamo Dewi dan Marita Abdiyana, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, hal. 110.

maupun gabungan daripada keduanya. Kementrian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus, akan tetapi Kementria Kesehatan menyebut cacat.³

Penyandang disabilitas dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu;

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyebab kecacatan fisik bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Cacat didapat (*acquired*)

Penyebab pada cacat ini dikarenakan kecelakaan, perang atau penyakit kronis.

b. Cacat bawaan (*congenital*)

Penyebab pada cacat ini karena kelainan pada pembentuk organ pada masa kehamilan, serangan virus, gizi yang buruk, konsumsi obat-obatan secara berlebihan, penyakit menular karena hubungan seksual.⁴

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa keadilan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat. Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas yaitu *kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan*. Hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas diatur

³ Eko Riyadi *et.all*, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hal. 293.

⁴ Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, hal. 114.

pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diantaranya yaitu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks diantaranya meliputi terdiri dari berbagai aspek yang terkait satu sama lain. Pendidikan dijalankan secara terencana dan teratur, dimana setiap elemen saling terlibat. Implementasi pendidikan secara berencana dan teratur memiliki tujuan agar pendidikan berkembang setiap waktu, terutama bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif.⁵ Pasal 23 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan khusus peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.⁶

Kasus mengenai penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tidak jarang terjadi. Pada tahun 2014 Koalisi Organisasi Disabilitas Indonesia melakukan pelaporan kepada Ombudsman kepada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, hal ini dikarenakan mereka menemukan beberapa syarat pendaftaran mendiskriminasikan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu Ombudsman mengambil tindakan untuk membuka pendaftaran secara

⁵ Nanang Fattah, 2009, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 6.

⁶ Mudhafar Ansari, *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, Law Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 (1) April 2018, pp. 57-58, hal. 58.

offline kepada universitas negeri maupun swasta yang melakukan diskriminasi.⁷

Tahun 2018 Ombudsman menjelaskan bahwa mereka menemukan komplikasi masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas pada Provinsi Kalimantan Selatan. Penyandang disabilitas pada usia sekolah adalah 25% atau setara dengan 24.839 anak. Jumlah penyandang disabilitas 1.453 anak mendapatkan pendidikan SLB (Sekolah Luar Biasa), yang tertampung pada sekolah inklusi adalah berjumlah 4.453 anak.⁸

Hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dijelaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 C yaitu; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan khusus dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan pendidikan bagi penyandang disabilitas, hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu penulis akan menulis skripsi dengan judul: **“Harmonisasi Regulasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Pendidikan”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak-hak pendidikan secara utuh di Indonesia ?

1.2.1 Bagaimana harmonisasai regulasi bagi penyandang diasbilitas dalam mendapatkan hak pendidikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak-hak pendidikan secara utuh di Indonesia.

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/574350/diskriminasi-pendidikan-bagi-disabilitas-meningkat/full&view=ok>

⁸ <https://siedoo.com/berita-14360-ombudsman-ungkap-persoalan-pendidikan-siswa-disabilitas/>

1.3.2 Untuk mengetahui harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

1.4.2 Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

1.4.3 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyandang Disabilitas Sudah Mendapatkan Hak-Hak Pendidikan Secara Utuh Di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anni Juwairiyah mengalami disabilitas fisik berupa kelainan tubuh (tuna daksa) yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

Anni Juwairiyah dan Akhmad Soleh awalnya sulit untuk mendapatkan hak pendidikan, dikarenakan keterbatasannya, akan tetapi perjuangannya tidak berhenti dan mereka terus mencoba hingga memperoleh keinginan, harapan dan cita-citanya. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan hak atas pendidikan yang terdapat pada Pasal 31 Ayat (1) yaitu bahwa setiap warga

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

negara berhak mendapatkan pendidikan; Ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 menjelaskan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Anni Juwairiyah dan Akhmad Soleh mendapatkan fasilitas, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan dan kesempatan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) yaitu keadilan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas, yaitu

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak;
 - 1) hidup;
 - 2) bebas dari stigma;
 - 3) privasi;
 - 4) kedilan dan perlindungan hukum;
 - 5) pendidikan;
 - 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - 7) kesehatan;
 - 8) politik;
 - 9) keagamaan;
 - 10) keolahragaan;

- 11) kebudayaan dan pariwisata;
 - 12) kesejahteraan sosial;
 - 13) aksesibilitas;
 - 14) pelayanan publik;
 - 15) perlindungan dari bencana;
 - 16) habilitasi dan rehabilitasi;
 - 17) konsesi;
 - 18) pendataan;
 - 19) hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
 - 20) bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan;
 - 22) bebas dari tindakan dekriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak;
- 1) atas kesehatan reproduksi;
 - 2) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - 3) mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
 - 4) untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak;
- 1) mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - 4) perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 5) pemenuhan kebutuhan khusus;
 - 6) perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan;
 - 7) pendapatkan pendampingan sosial.

Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah hingga instansi swasta merupakan kerja nyata daripada amanat undang-undang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan

hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi kekayaan intelektualnya.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak; a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa selain hak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), khusus bagi anak menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 12 menjelaskan setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

3.2 Harmonisasi Regulasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Pendidikan

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Cara perlindungan secara hukum adalah:

- 1) Membuat peraturan (*giving regulation*), yang bertujuan untuk : a) Memberikan hak dan kewajiban; b) Menjamin hak para subjek.
- 2) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui : a) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan. b) Hukum pidana yang berfungsi menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman. c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau kerugian.

Upaya pemerintah terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya adalah;

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adi Karya Bakti, hal. 54.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas runtu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggara pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi

- administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghiatan kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggara pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pengaturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan penyandang disabilitas merupakan hak yang telah mendapatkan pengakuan baik dalam aturan internasional maupun nasional. Pengakuan hak pendidikan terdapat pada artikel 26 The Universal Declaration of Human Rights, pada article 13 mengakui pendidikan dasar harus diberikan kepada setiap orang dengan Cuma-cuma. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Hal ini terdapat pada pasal Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik dalam aturan internasional tentang penyandang disabilitas adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities dengan Resolusi 61/106 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dan hak pendidikan diatur dalam article 24. Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 12. Secara spesifik perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya jaminan pendidikan ini, penyandang disabilitas memiliki jalan yang luas dalam meningkatkan kemampuan diri

untuk beradaptasi terhadap teknologi dan untuk mendapatkan standart kehidupan yang lebih baik.

Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Implementasi undang-undang pada dasarnya pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.

4.2 Saran

Untuk pemerintah, diharapkan kedepannya membuat regulasi baik undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang mendukung hak pendidikan maupun hak lainnya bagi penyandang disabilitas terkait dengan akses dan fasilitas yang diberikan.

Untuk pemerintah, diharapkan melakukan sosialisasi kepada pihak keluarga mengenai pentingnya pendidikan untuk penyandang disabilitas, sehingga mampu memberikan semangat atau motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Untuk orang tua, diharapkan melakukan komunikasi dan konsultasi kepada instansi terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas agar tidak merasa berkecil hati dan semakin percaya diri bahwa disabilitas bukan halangan melakukan interaksi sosial.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan Karya Ilmiah ini kepada, Pertama, terimakasih kepada keluarga atas segala doa dan dukungan yang diberikan selalu kepada penulis. Kedua, terimakasih kepada Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H. atas bimbingan dan saran serta nasehat yang diberikan

kepada penulis. Ketiga, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Ansari, Mudhafar, *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, Law Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 (1) April 2018, pp. 57-58

Fattah, Nanang, 2009, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Lestari, Eta Yuni *et.all*, 2017, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan*, No.1/Th. XXVII/2017, Januari-Juni

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adi Karya Bakti

Rahayu, Sugi & Dewi, Utamo & Abdiyana, Marita, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta

Riyadi, Eko *et.all*, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII

Nugroho, Sapto & Utami, Risnawati, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta

<https://nasional.tempo.co/read/574350/diskriminasi-pendidikan-bagi-disabilitas-meningkat/full&view=ok>

<https://siedoo.com/berita-14360-ombudsman-ungkap-persoalan-pendidikan-siswa-disabilitas/>

UUD 1945

UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas